

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu penggerak ekonomi nasional. Indonesia mulai melakukan deregulasi perbankan pada 1983. Bank Indonesia (BI) memberi keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Tanggal 18 - 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991.

Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992: tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis usaha yang diperbolehkan. Progres perkembangan perbankan syariah yang mencapai rata – rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir diharapkan dapat mempengaruhi peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan

**TABEL 1.1**  
**DATA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**  
**PERIODE 2015 – 2018**

Indikator	Periode			
	2015	2016	2017	2018
BUS	1.990	1.869	1.825	1.875
UUS	311	332	344	354
BPRS	446	453	441	495
Aset (miliar Rp)	213.423	254.184	288.027	477.327
DPK (miliar Rp)	231.175	279.333	334.888	354.421

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Syariah (2015-2018)

Berdasar data di atas dapat kita ketahui perkembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2015-2018. Indikator Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup pesat. Tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang cukup pesat yaitu dengan total 1.869 unit. Tahun 2017 terjadi penurunan lagi menjadi 1.825 unit Bank Umum Syariah. Terjadi peningkatan pada tahun 2018 yakni jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia meningkat menjadi 1.875 unit. Indikator UUS (Unit Usaha Syariah) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015-2016 jumlah peningkatan menjadi 332 unit pada tahun 2016. Jumlah UUS tahun 2017 mencapai 344 unit. Tahun 2018 jumlah UUS meningkat lagi dengan total 354 unit. Indikator BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Tahun 2015-2016 BPRS mengalami peningkatan dengan jumlah total sebanyak 453 unit. Total pada tahun 2017 jumlah BPRS mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 441 unit. Jumlah total BPRS tahun 2018 meningkat dengan cukup pesat dengan total 495 unit.

Perbankan syariah memiliki jaringan yang cukup banyak, namun secara spesifik jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Indikator aset tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yang stabil. Tahun 2016 aset perbankan syariah mencapai Rp. 254.148 miliar hingga pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan aset. Peningkatan aset tersebut merupakan kontribusi dari bank syariah yang merupakan anak usaha bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Peningkatan aset perbankan syariah harus terus diupayakan dengan cara sekuritisasi aset bank syariah. Sekuritisasi akan meningkatkan ketersediaan dana bagi perbankan syariah di Indonesia. Konsep sekuritisasi aset ini, bank syariah mentransformasikan aset berisikonya ke dalam bentuk uang tunai yang kemudian dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana.

Indikator DPK (Dana Pihak Ketiga) pada rentang tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yang stabil. Terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2015-2017 yang mencapai total Rp. 334.888 miliar dan pada akhir tahun 2018 mencapai Rp. 354.421 miliar. Peningkatan DPK pada perbankan syariah didorong oleh peningkatan penggunaan teknologi informasi dan berbagai aplikasi pembayaran yang memudahkan masyarakat. Pertumbuhan DPK tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat semakin mengenal produk – produk perbankan syariah. Melihat data perkembangan perbankan syariah pada tabel di atas maka akan mendorong perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya

dalam melayani nasabah dan membuat *image* perbankan syariah baik di mata masyarakat agar semakin berkembang pesat.

Salah satu cara untuk membuat *image* baik di mata masyarakat dan menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah sebagai pilihan layanan jasa keuangan yaitu dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau perbankan untuk kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup bagi lingkungan sekitar. Farook (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan konsep syariah maupun perbankan syariah harus mempunyai pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik. Ajaran Islam diajarkan untuk membangun masyarakat yang adil dan memiliki kemaslahatan untuk umat manusia yang sesuai dinyatakan Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat tersebut adalah Qs. Adz-Dzariyat Ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Asbabun Nuzul Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan bin Muhammad Bin Hanafiyah bahwa suatu ketika Rasulullah mengutus sekelompok pasukan. Pasukan tersebut berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan banyak harta rampasan. Ketika akan dilangsungkan pembagian datang sekelompok orang untuk meminta bagian dari harta tersebut. Tidak lama kemudian, turunlah ayat ini. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan siapa yang tergolong orang

miskin itu, dengan sabdanya:” Bukanlah orang miskin itu yang dapat ditolak atau disuruh pulang dengan pemberian sebiji atau dua biji kurma atau sesuap atau dua suap makanan. Beliau ditanya, “(jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?” beliau menjawab, “orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan yang tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrum (tidak dapat bagiab)” (HR. Ibnu Jarir dari Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairah). Ayat dan Hadist tersebut dapat dikaitkan dengan tanggung jawab sosial atau CSR dalam perbankan syariah utamanya bahwa setiap harta yang dimiliki atau aset dalam hal perbankan syariah agar kegiatannya berkah dan sesuai ajaran agama Islam ada bagian orang lain untuk disampaikan atau diberikan. Adanya tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka entitas tersebut telah melaksanakan atau mengamalkan sebagian kecil dari perintah Allah SWT.

Salah satu cara yang dapat digunakan perbankan untuk mengungkapkan tingkat tanggung jawab sosial atau CSR adalah dengan menganalisis dan mengevaluasi kegiatannya melalui laporan keuangan tahunan pada bank maupun perusahaan itu sendiri. Cara yang dapat diterapkan untuk melihat kinerja bank syariah selain menggunakan rasio keuangan seperti pada perbankan konvensional yaitu dengan menggunakan alat ukur lain yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting* merupakan bentuk tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan daripada perusahaan yang sesuai dengan prinsip Islam. *Islamic Social Reporting* dikemukakan pertama kali oleh peneliti dari Negara Malaysia (Haniffa, 2002) mengungkapkan bahwasannya adanya keterbatasan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social*

*Reporting* berdasar ketentuan syariah yang prinsipnya tidak hanya untuk membantu pengambilan keputusan masyarakat muslim, melainkan untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban kepada Allah SWT. *Islamic Social Reporting* juga menjadi hal yang penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah. Adanya pengungkapan ISR, dapat dikatakan lembaga keuangan syariah akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka.

*Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan entitas Islam di dalamnya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi, gharar dan mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti infak, sedekah, wakaf sampai dalam mengungkapkan bagaimana peribadahan dilingkungan perusahaan. Indeks ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan pijakan atau prinsip Islam.

Faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR salah satunya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut dilihat dari Profitabilitas. Perusahaan maupun perbankan syariah dengan profit yang tinggi pasti akan melakukan *Islamic Social Reporting* sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemilik modal atas dana yang telah diinvestasikan. Othman et al (2009) mengatakan apabila perusahaan sedang mendapat keuntungan tinggi, maka manager akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi secara rinci dalam rangka mendukung kelanjutan posisi mereka. Ketika keuntungan menurun, maka manager akan memberi informasi yang kurang dalam rangka menyembunyikan alasan keuntungan menurun. Indikator pertama kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio Profitabilitas

yang diukur dengan ROA (*Return On Assets*). ROA merupakan rasio Profitabilitas yang mampu mengukur efektivitas perbankan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki serta untuk menilai kinerja bank secara umum. Rasio ini dinyatakan dengan laba bersih dibagi total aset. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan atau bank, maka bank tersebut dikatakan efektif dalam menggunakan aktiva untuk mendapat peningkatan laba.

Faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR selain kinerja keuangan yaitu Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah dewan yang bertugas memberi saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah yang besar akan menjalankan tugas untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip islam serta diharapkan bank syariah juga berperan dalam mewajibkan aktivitas sosial dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank syariah. Semakin banyak jumlah anggota DPS, maka kinerja bank semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab secara islami akan semakin meningkat.

Penelitian yang sedang dijalankan peneliti saat ini dilakukan untuk menemukan kebenaran apakah variabel tersebut berpengaruh pada *Islamic Social Reporting* dan dilakukan untuk menghasilkan konsistensi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesenjangan penelitian pada penelitian terdahulu tersebut dikarenakan adanya hasil temuan dari penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016), Othman (2009) serta Firdaus (2017). Selain itu, kesenjangan penelitian juga disebabkan oleh

masih sedikitnya penelitian yang menguji pengaruh suatu variabel terhadap *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat hasil temuan yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu oleh Ramadhani (2016) yang mengungkapkan bahwa variabel Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* serta pada variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian terdahulu oleh Othman (2009) mengungkapkan bahwa variabel Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap tingkat ISR. Penelitian terdahulu oleh Firdaus (2017) mengungkapkan bahwa Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* serta pada variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Keuangan dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018. Diharapkan perbankan syariah dapat melaksanakan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah dan peduli dengan tanggung jawab sosial melalui ISR. Berdasar permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* dilihat dari Kinerja Keuangan dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah melalui variabel Profitabilitas (*Return On Asset*), dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kinerja Keuangan yang diwakili profitabilitas berpengaruh pada *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh pada *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas pada *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah pada *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan antara lain :

1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada bank syariah untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah yang dilihat dari variabel profitabilitas (*Return On Asset*), dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta dapat meningkatkan pengungkapan tingkat tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia.

## 2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang Ekonomi Syariah terkait dengan *Islamic Social Reporting* dilihat dari variabel Profitabilitas (*Return On Asset*) dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial melalui *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## 3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan acuan bagi semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang ingin melakukan penelitian yang sama, yaitu dengan menjadikan penelitian ini menjadi penelitian terdahulu yang dilihat dari variabel Profitabilitas (*Return On Assets*), dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dibuat oleh peneliti agar lebih mudah dalam memahami skripsi. Peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## BAB IV GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat bagian kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.